

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Dilarang Buang Sampah!

Belasan Truk Dihentikan Dishub Bekasi.

TRUK-TRUK sampah milik Pemprov DKI dicegat anggota Dishub Kota Bekasi. Mereka dilarang membuang sampah warga DKI ke TPST Bantargebang.

Bekasi, Warta Kota

Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dilarang membuang sampaharganya ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi.

Seruan larangan ini digaungkan Pemerintah Kota Bekasi sebab Pemprov DKI dianggap tidak memenuhi beberapa kewajiban yang selama ini sudah berjalan.

Tak ayal, pada Rabu (17/10) siang kemarin, pihak Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghadang belasan truk sampah DKI Jakarta di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Saat itu truk-truk yang mengangkut sampah itu baru saja keluar gerbang Tol Bekasi Barat dan hendak menuju TPST Bantargebang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana mengatakan, penghentian truk DKI Jakarta ini atas instruksi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Dia juga menyebut, penghentian truk ini karena dianggap kerjasama antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi tidak berjalan baik.

"Truk kita hentikan dan saat diperiksa sopir tidak bisa menunjukkan buku KIR sehingga truk kita amankan di Hutun Kota," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana pada Rabu (17/10).

Menurut Yayan, buku KIR merupakan

hal yang mutlak bagi kendaraan bermuatan barang maupun penumpang. KIR, kata dia, juga sebagai syarat bahwa kendaraan itu layak untuk digunakan. "Kalau tidak ada buku KIR yah fatal," imbuhnya.

Dalam operasi ini, kata dia, pihaknya mengerahkan sekitar 20 personel untuk menindak truk sampah itu. Penindakan ini juga bakal dilakukan selama beberapa hari.

"Surat perintah yang saya terima akan kita lakukan terus selama beberapa hari. Besok (Kamis, 18/10) kami juga akan melakukan operasi lagi di titik yang sama," ucapnya. (faf/m18)

Kewajiban Pemprov DKI sebagai Mitra dengan Pemkot Bekasi yang Tidak Berjalan :

- Saat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 2016 lalu, Kota Bekasi mendapatkan dana hibah untuk pembangunan infrastruktur sekitar Rp 316 miliar. Pemberian dana ini, bahkan rutin diterima selama Ahok menjabat sebagai gubernur dari Rp 90 miliar menjadi Rp 230 miliar hingga Rp 316 miliar.



- Dana sebanyak itu digunakan Kota Bekasi untuk :

- Perbaikan infrastruktur yang bersentuhan dengan kepentingan DKI seperti pembangunan jembatan Jatiwaringin, pembangunan jalan layang Rawapanjang dan Cipendawa serta sebagainya.

- Untuk pembangunan jalan layang Rawapanjang dan Cipendawa diyakini bakal memecah kemacetan kendaraan, sekaligus mempermudah truk sampah DKI menuju TPST Bantargebang.

- Saat kepemimpinan Anies Baswedan, bantuan itu dihentikan untuk dievaluasi. Meski demikian, Kota Bekasi tetap mendapatkan uang kompensasi bau untuk 18.000 kepala keluarga (KK) yang terkena dampak TPST Bantargebang sebesar Rp 900.000 per tiga bulan.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Dilarang Buang Sampah!

Isnawa Adji, Kadis Lingkungan Hidup DKI

Menyayangkan Penghentian Truk Sampah

Pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyayangkan adanya penghentian terhadap 16 truk sampah di Kota Bekasi saat menuju ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Rabu (17/10) siang. Pihak DKI mengklaim telah menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Kota Bekasi.



"Saya rasa komunikasi yang terjalin selama ini kan sudah berjalan baik," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji, melalui pesan singkat, Rabu (17/10).

Menyusul kejadian ini, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memantau

keadaan tersebut. Dia berharap, agar truk tetap diberikan jalan agar tidak mengganggu pelayanan persampahan DKI Jakarta.

Sampai saat ini, kata dia, Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta sedang menginventarisir realisasi kerjasama dengan Kota Bekasi. Dia menginginkan, agar kerjasama dengan Kota Bekasi bisa kembali lancar. "Biro Tata Pemerintahan sedang mengecek kerjasamanya untuk dilihat kembali," ujar Isnawa. (faf)

Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi

Ada Kewajiban DKI yang Sudah Tak Berjalan!

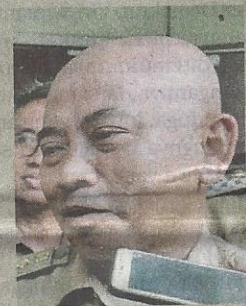
Memertanyakan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kota Bekasi dengan Provinsi DKI Jakarta terkait TPST Bantargebang, Rahmat Effendi menilai, ada beberapa kewajiban DKI sebagai mitra Kota Bekasi, selaku pemilik lahan TPST Bantargebang, yang dianggap

kurang berjalan dengan baik. "Ada kewajiban DKI sebagai kemitraan dan ini yang sudah nggak jalan," ucapnya, Rabu 17/10.

Tidak hanya kewajiban DKI yang dianggap tidak berjalan, pengelolaan sampah di TPST juga dianggap masih menggunakan sistem tradisional yakni open

dumping. Bahkan sejumlah masyarakat melalui beberapa tokoh di sana, meminta agar TPST itu ditutup bila masih menggunakan sistem tradisional.

"Kami itu adalah mitra DKI dan sudah menjalin kerjasama sejak lama. Kami juga memberikan yang terbaik," ujarnya. (faf)



Mohammad Azzam

Teks: Dedi. Foto: Fitriandi AL Fajri. Grafis: Agus Rijanto